



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAFLIZAR
2. Jabatan : SEKRETARIS
3. NHK : 733550

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 276 m2/322 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/54 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
3. Tanah Seluas 18750 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 45000 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 27500 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 8100 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 975.000.000
7. Tanah Seluas 1296 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HIBAH TANPA AKTA Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 258.000.000**

1. MOBIL, PAJERO SPORT GLS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MEO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX B6H.AI A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 35.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	197.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.540.000.000
III. HUTANG	Rp.	818.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.722.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.